

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Negara-negara berkembang yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang rumit dan lebih serius dari pada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan. Kondisi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini tidak sanggup menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak daripada pertambahan penduduk, sehingga masalah pengangguran dari tahun ketahun semakin serius. Apabila hal tersebut terjadi dan tidak segera diatasi dan dicari jalan keluarnya, maka dapat menimbulkan kerawanan social dan berpotensi menambah tingkat kemiskinan (Siswosoemarto, 2012).

Permasalahan tersebut juga terjadi di Indonesia, dimana merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Dengan banyaknya jumlah penduduk, Indonesia memiliki potensi besar sebagai penggerak dalam pembangunan ekonomi. Namun masalah yang dihadapi Indonesia saat ini adalah dimana jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar tidak menjadi aset yang dapat dikembangkan untuk menggerakkan perekonomian, namun malah menjadi penghambat negara dalam pembangunan. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia.

Pada Agustus 2024, jumlah angkatan kerja di Indonesia tercatat mencapai 152,11 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 4,40 juta orang dibandingkan dengan 147,71 juta orang pada Agustus 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 144,64 juta orang bekerja, sementara 7,47 juta orang berada dalam status pengangguran. (Badan Pusat Statistik). Pengangguran merupakan seseorang yang tergolong angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan (Badan Pusat Statistik). Menurut (Yoga, 2021) pengangguran adalah suatu kondisi untuk usia angkatan kerja pada rentang 15-65 tahun yang memang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak melakukan pencarian pekerjaan contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa Sekolah Menengah Pertama, siswa Sekolah Menengah Atas, mahasiswa, serta lainnya dikarenakan belum membutuhkan pekerjaan.

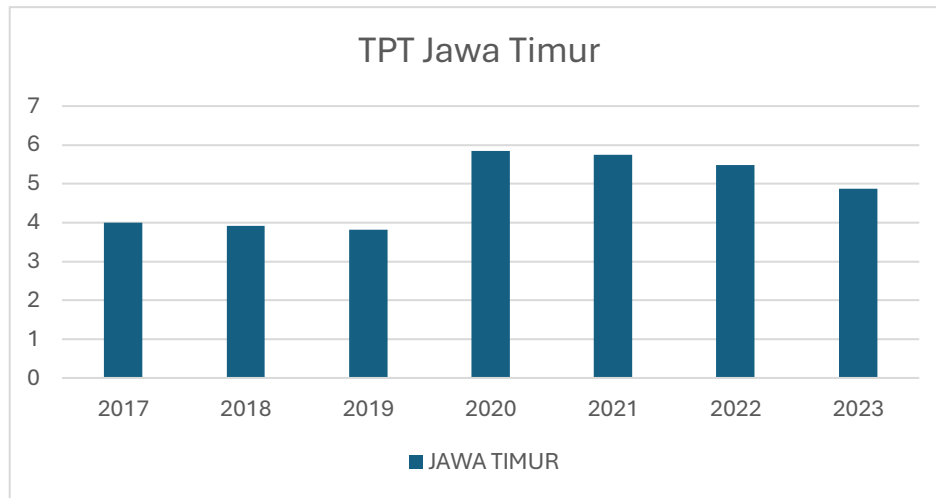
Pengangguran terbagi menjadi dua yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran tertutup. Seseorang dapat dikatakan pengangguran terbuka jika ia tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan sedang berusaha mencari pekerjaan, sedangkan pengangguran tertutup adalah seseorang yang memiliki produktivitas rendah, pendapatan rendah, tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta memiliki jam kerja tidak menentu yaitu ≤ 35 Jam selama satu minggu. Pengangguran terjadi ketika jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja. Selain itu, ketidaksesuaian kompetensi para pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja juga menjadi penyebab utama pengangguran (Yoga, 2021). Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang berdampak pada keberlangsungan hidup seseorang secara langsung. Besarnya

pengangguran dapat 3 menghambat pembangunan ekonomi karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan tidak mempunyai pendapatan. Tiadanya pendapatan menyebabkan berkurangnya biaya konsumsi dan hal ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan (Fikriah, 2020).

Masalah pengangguran tidak hanya dialami oleh negara berkembang saja, namun masalah pengangguran ini juga dialami oleh negara-negara yang sudah maju dan masalah pengangguran juga menjadi masalah terbesar bagi sebuah negara. Standar hidup suatu negara dapat dilihat dari jumlah pengangguran yang dimilikinya (Mankiw, 2020). Menurut (Susiaturun, 2018) dampak dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang, sehingga bisa menjebak masyarakat ke dalam rantai kemiskinan dikarenakan tidak memiliki pendapatan dan juga menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator indikator ekonomi yang mempengaruhinya antara lain pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran (Ekonominika, 2014). Upaya dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu salah satunya dengan mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan membuat pendapatan nasional juga meningkat dan adanya penyerapan tenaga kerja yang akan berpengaruh pada pengurangan pengangguran (Tama, 2016).

Kesejahteraan masyarakat dan pengangguran merupakan dua aspek yang saling terkait dalam konteks pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai melalui peningkatan konsumsi, mencerminkan taraf hidup yang lebih unggul bagi penduduk setempat. Kesejahteraan masyarakat diukur melalui berbagai indikator, termasuk pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Ketika pengangguran meningkat, dampaknya langsung terasa pada kesejahteraan Masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas atau pelatihan keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Hal ini mengakibatkan kurangnya tenaga kerja terampil yang dapat memenuhi kebutuhan industri, sehingga memperburuk situasi pengangguran (Kasim et al., 2021). Masalah pengangguran di Jawa Timur menjadi cukup kompleks karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait, serta telah menyebar secara merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti Surabaya, tetapi juga merambah ke daerah lainnya di Jawa Timur.

Grafik 1.1**Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur**

Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur (persen)

Tahun 2017 – 2023

Berdasarkan grafik di atas, TPT Jawa Timur menunjukkan tren yang relatif stabil dan cenderung menurun pada periode sebelum pandemi, yaitu dari 4% pada tahun 2017, turun menjadi 3.90% pada tahun 2018, dan terus menurun menjadi 3.82 % pada tahun 2019. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebelum terjadinya pandemi Covid-19, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur relatif membaik setiap tahunnya, ditandai dengan semakin berkurangnya proporsi angkatan kerja yang menganggur. Namun, terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada tahun 2020, di mana TPT melonjak tajam menjadi 5.84% , atau meningkat sekitar 2 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini merupakan dampak langsung dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), merumahkan karyawan, maupun mengurangi aktivitas produksi akibat pembatasan sosial (PSBB/PPKM), sehingga secara drastis meningkatkan jumlah pengangguran di Jawa Timur.

Setelah mencapai puncaknya di tahun 2020, TPT Jawa Timur menunjukkan tren perlahan menurun pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 5.74 persen pada 2021, 5.49 persen pada 2022, dan 4.91 persen pada 2023. Tren penurunan ini mengindikasikan adanya proses pemulihan ekonomi (economic recovery) pasca-pandemi, di mana aktivitas ekonomi yang mulai berjalan normal kembali secara bertahap mampu menyerap kembali tenaga kerja yang sempat menganggur akibat pandemi. Meski demikian, nilai TPT tahun 2023 (4.91 persen) masih belum kembali ke level sebelum pandemi 2019 sebesar 3.82 persen), yang menunjukkan bahwa proses pemulihan pasar tenaga kerja di Jawa Timur masih berlangsung dan belum sepenuhnya pulih total setelah empat tahun berselang.

Secara keseluruhan, pola pergerakan TPT Jawa Timur ini mengonfirmasi bahwa tahun 2020 merupakan titik structural break atau titik guncangan (shock) utama dalam data time series penelitian ini akibat pandemi Covid-19, yang relevan untuk kamu jadikan catatan dalam pembahasan Bab IV terkait kondisi objek penelitian, khususnya untuk menjelaskan mengapa data tahun 2020 memiliki karakteristik yang berbeda (outlier) dibandingkan tahun-tahun lainnya dalam analisis panel data GKS.

Fluktuatifnya pengangguran menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Penciptaan lapangan kerja bertujuan agar lebih banyak angkatan kerja dapat terserap, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut. Lapangan pekerjaan yang terbatas dan tidak mampu menyerap angkatan kerja yang ada mengindikasikan adanya kegagalan kebijakan pembangunan yang berdampak pada aspek sosial,

ekonomi, dan politik. Ketidakmampuan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dapat membuat seseorang menjadi tidak produktif dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Silaswara et al., 2021). Hal tersebut pada akhirnya dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial lainnya, seperti kriminalitas dan kemiskinan. Masalah pengangguran masih menjadi isu strategis dalam pembangunan di tingkat daerah. Mengurangi pengangguran termasuk salah satu agenda yang diprioritaskan dalam pembangunan yang tertera pada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 Provinsi Jawa Timur. Dalam menanggulangi pengangguran pemerintah Provinsi Jawa Timur terus bekerja untuk menekan pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan di berbagai sektor guna mengimbangi adanya tambahan angkatan kerja baru yang bertambah setiap tahunnya. Dalam mengatasi masalah pengangguran, perlu diketahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingginya pengangguran sehingga dapat dirumuskan suatu alternatif kebijakan pembangunan yang tepat untuk mengatasi masalah pengangguran. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran di Provinsi Jawa Timur adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perkembangan aktivitas dalam perekonomian yang menyebabkan barang maupun jasa yang telah di produksi dalam masyarakat dapat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur keberhasilan ekonomi pada suatu wilayah (Sukirno, 2021).

Pada tingkat provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur menunjukkan dinamika yang menarik sepanjang periode 2017-2023. Setelah

berada di kisaran 6,04 persen pada tahun 2019, TPT Jawa Timur sempat mengalami lonjakan tajam akibat guncangan pandemi COVID-19 pada tahun 2020, sejalan dengan pola nasional yang turut melonjak signifikan pada periode yang sama akibat pembatasan aktivitas ekonomi secara masif (BPS, 2020). Pasca-pandemi, TPT Jawa Timur berangsur pulih dan menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 5,74 persen pada Agustus 2021 menjadi 5,49 persen (2022) dan 4,88 persen (2023) (BPS, 2023). Meskipun demikian, penurunan TPT secara agregat provinsi ini menyisakan catatan penting: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Timur (2023) mengungkapkan bahwa TPT lulusan SMK dan Perguruan Tinggi justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara jenjang pendidikan lain menunjukkan penurunan, mengindikasikan bahwa perbaikan angka pengangguran secara agregat belum tentu mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan secara merata di seluruh kelompok maupun wilayah. Fenomena inilah yang kemudian tampak lebih tajam ketika ditelusuri hingga level kawasan Gerbangkertosusila, di mana ketimpangan TPT antarwilayah dan paradoks pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran justru semakin terlihat jelas. (Boediono, 2018)

Secara teoretis, tingkat pengangguran suatu wilayah erat kaitannya dengan sisi permintaan agregat perekonomian. Dalam kerangka pemikiran Keynesian, permintaan agregat dibentuk oleh konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, serta net ekspor. Ketika komponen-komponen permintaan agregat ini tumbuh, produksi barang dan jasa akan meningkat, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan pada akhirnya menekan tingkat pengangguran

(Keynes, 1936; Mankiw, 2019). Hubungan antara sisi permintaan agregat dan pengangguran ini juga tercermin dalam Hukum Okun (Okun's Law), yang menyatakan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan output/permintaan agregat dengan tingkat pengangguran (Okun, 1962).

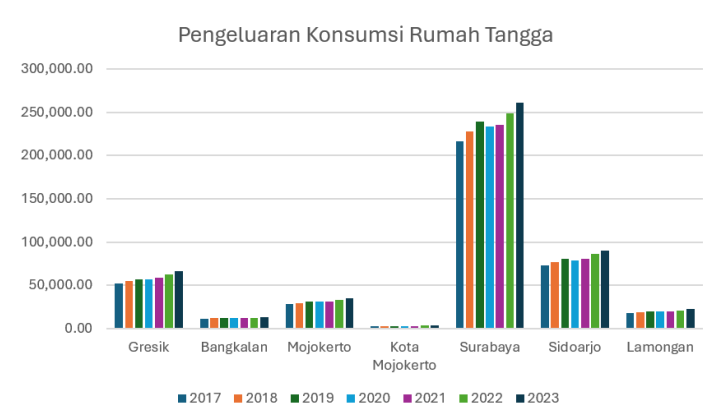
Konsumsi rumah tangga merupakan komponen permintaan agregat dengan porsi terbesar dalam perekonomian, sehingga fluktuasi daya beli masyarakat berdampak langsung terhadap tingkat produksi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor riil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pola pengeluaran konsumsi rumah tangga di kabupaten/kota Gerbangkertosusila mengalami perubahan komposisi yang signifikan pasca pandemi COVID-19, dengan proporsi pengeluaran non-makanan yang cenderung meningkat, mengindikasikan adanya pergeseran daya beli masyarakat di kawasan tersebut.

Selain konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah juga memegang peranan penting dalam mendorong permintaan agregat, khususnya melalui belanja pegawai yang secara langsung meningkatkan daya beli aparatur pemerintah daerah dan secara tidak langsung turut menggerakkan roda perekonomian lokal (*multiplier effect*). Di sisi lain, investasi baik yang berasal dari penanaman modal swasta maupun belanja modal pemerintah diyakini menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja baru dalam jangka menengah dan panjang, karena investasi baru pada umumnya diikuti dengan pembukaan usaha, perluasan kapasitas produksi, dan penyerapan tenaga kerja baru (Sudirman & Alhudhori, 2018; Pratama, Rahmi, & Amaliah, 2022).

Studi terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan investasi terhadap pengangguran. Kuswiyati dan Utomo (2022) menemukan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan, sejalan dengan teori multiplier effect. Namun, penelitian Rahayu dkk. (2025) di Provinsi Kalimantan Barat justru menemukan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pengangguran dalam jangka panjang, yang mengindikasikan bahwa investasi padat modal (*capital intensive*) belum tentu menyerap tenaga kerja secara proporsional. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara investasi dan pengangguran sangat bergantung pada karakteristik struktur ekonomi wilayah yang diteliti, sehingga penelitian serupa pada konteks kawasan Gerbangkertosusila menjadi penting untuk dilakukan.

Grafik 1.2

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga



Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kawasan Gerbangkertosusila (Juta
Rupiah) Tahun 2017 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Berdasarkan grafik 1.3 tersebut menggambarkan perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga di kawasan Gerbangkertosusila yang meliputi Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan selama periode 2017 hingga 2023. Secara umum, grafik menunjukkan tren peningkatan konsumsi rumah tangga di hampir seluruh wilayah, meskipun sempat terjadi perlambatan pada tahun 2020 yang berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19.

Kota Surabaya merupakan daerah dengan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga tertinggi sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2019, konsumsi rumah tangga Surabaya tercatat sebesar 239.677,49 juta rupiah, mengalami penurunan pada tahun 2020, kemudian kembali meningkat secara signifikan hingga pada tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan peran Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa di Jawa Timur yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat relatif tinggi.

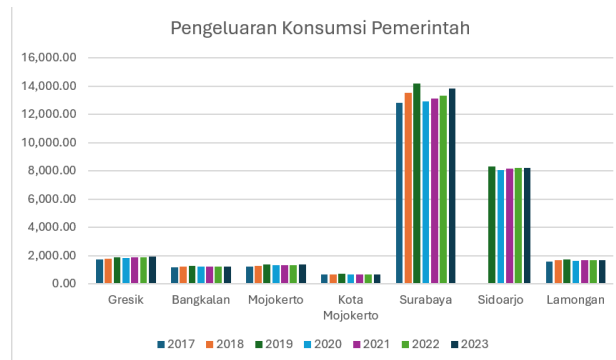
Kabupaten Sidoarjo menempati posisi kedua dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang juga menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2019, konsumsi rumah tangga Sidoarjo sebesar 80.332,76 juta rupiah, sedikit menurun pada tahun 2020, kemudian meningkat secara konsisten pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan pemulihan ekonomi pascapandemi serta meningkatnya pendapatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kabupaten Gresik juga menunjukkan perkembangan konsumsi yang positif. Setelah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat dari 57.469,63 juta rupiah pada tahun 2019

menjadi 66.176,15 juta rupiah pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan karakteristik Gresik sebagai kawasan industri yang menopang pendapatan masyarakat.

Sementara itu, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan memiliki tingkat konsumsi yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah inti seperti Surabaya dan Sidoarjo, namun tetap menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Kabupaten Mojokerto meningkat dari 31.335,98 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 34.878,51 juta rupiah pada tahun 2023, sedangkan Kabupaten Lamongan meningkat dari 20.194,06 juta rupiah menjadi 22.429,77 juta rupiah pada periode yang sama.

Untuk wilayah dengan nilai konsumsi terendah, yaitu Kota Mojokerto dan Kabupaten Bangkalan, pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap menunjukkan kenaikan bertahap meskipun dalam skala yang lebih kecil. Kota Mojokerto meningkat dari 3.356,94 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 3.803,91 juta rupiah pada tahun 2023, sedangkan Kabupaten Bangkalan meningkat dari 12.557,10 juta rupiah menjadi 13.444,80 juta rupiah.

Grafik 1.3**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kawasan Gerbangkertosusila (Juta
Rupiah) Tahun 2017 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2023

Berdasarkan grafik 1.4 tersebut menunjukkan perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah di kawasan Gerbangkertosusila yang meliputi Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan selama periode 2017–2023. Secara umum, pengeluaran konsumsi pemerintah di wilayah ini cenderung fluktuatif, dengan penurunan pada awal periode pandemi dan peningkatan kembali pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan belanja publik.

Kota Surabaya menjadi wilayah dengan pengeluaran konsumsi pemerintah tertinggi sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2019, pengeluaran konsumsi pemerintah Surabaya tercatat sebesar 14.195,51 juta rupiah, mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2020 akibat refocusing anggaran selama pandemi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan secara bertahap pada tahun 2023,

yang mencerminkan kembali meningkatnya aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Kabupaten Sidoarjo menempati posisi kedua dengan pengeluaran konsumsi pemerintah yang relatif besar. Pada tahun 2019, pengeluaran tercatat sebesar 8.323,57 juta rupiah, mengalami penurunan pada tahun 2020, kemudian meningkat kembali hingga mencapai 8.206,64 juta rupiah pada tahun 2023. Pola ini menunjukkan adanya penyesuaian anggaran pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi serta fokus pada pemulihan pascapandemi.

Kabupaten Gresik menunjukkan tren pengeluaran konsumsi pemerintah yang cenderung meningkat secara stabil. Pengeluaran meningkat pada tahun 2019 dan juga pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan konsistensi belanja pemerintah dalam mendukung aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

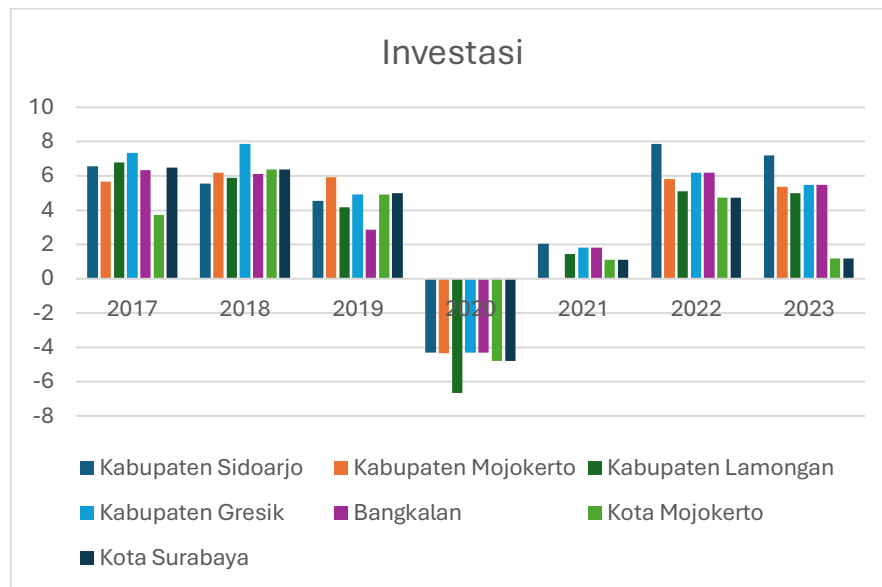
Sementara itu, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan memiliki nilai pengeluaran konsumsi pemerintah yang relatif menengah. Kabupaten Mojokerto meningkat dari 1.351,23 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 1.359,98 juta rupiah pada tahun 2023, sedangkan Kabupaten Lamongan mengalami fluktuasi ringan namun cenderung meningkat dari 1.724,93 juta rupiah menjadi 1.687,39 juta rupiah pada periode yang sama.

Wilayah dengan pengeluaran konsumsi pemerintah terendah adalah Kota Mojokerto dan Kabupaten Bangkalan. Kota Mojokerto mencatat pengeluaran sebesar 697,60 juta rupiah pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 685,93 juta rupiah pada tahun 2023, sementara Kabupaten Bangkalan meningkat secara perlahan dari 1.268,69 juta rupiah menjadi 1.217,40 juta rupiah. Rendahnya nilai

pengeluaran ini mencerminkan skala wilayah dan kapasitas fiskal yang lebih kecil dibandingkan daerah inti.

Grafik 1.4

Investasi



Investasi Kawasan Gerbangkertosusila (persen) Tahun 2017 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2023

Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan investasi di ketujuh wilayah (Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Bangkalan, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya) menunjukkan pola pergerakan yang relatif fluktuatif namun cenderung positif pada periode 2017–2019, dengan nilai pertumbuhan investasi berkisar antara 4 hingga 8 persen di hampir seluruh wilayah. Pada periode ini, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya cenderung menunjukkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sementara Kota Mojokerto relatif berada di level yang lebih rendah.

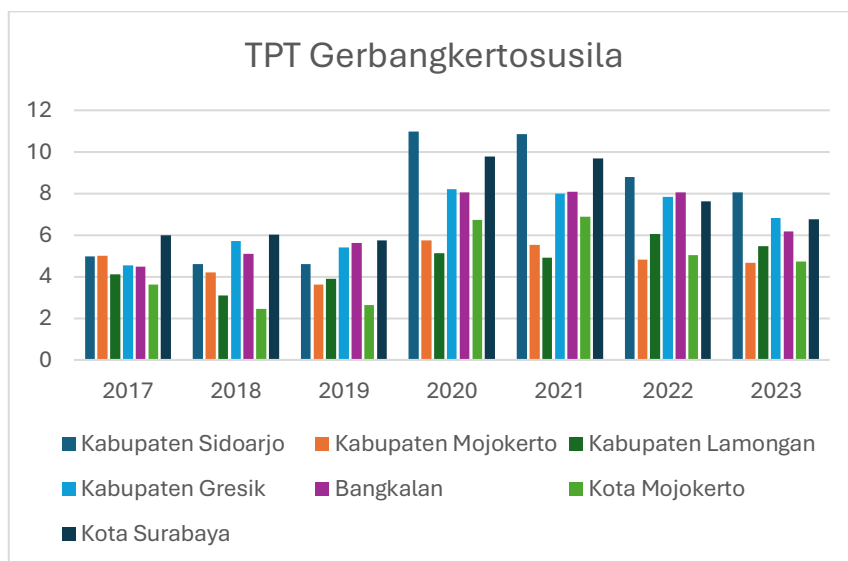
Perubahan paling drastis terjadi pada tahun 2020, di mana pertumbuhan investasi di seluruh tujuh wilayah anjlok tajam ke wilayah negatif, dengan penurunan paling ekstrem terjadi di Kota Mojokerto yang mencapai sekitar -7 persen, diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya yang juga berkontraksi pada kisaran -2 hingga -5 persen. Kondisi ini secara jelas mengonfirmasi dampak pandemi Covid-19 terhadap iklim investasi di seluruh wilayah Gerbangkertosusila, di mana ketidakpastian ekonomi global dan domestik, pembatasan aktivitas usaha, serta menurunnya kepercayaan investor menyebabkan realisasi investasi (PMTB) mengalami kontraksi serentak di seluruh kabupaten/kota pada tahun yang sama — memperkuat temuan bahwa tahun 2020 merupakan titik guncangan struktural (structural break) dalam data panel penelitian ini, konsisten dengan pola yang juga terlihat pada data TPT Jawa Timur sebelumnya.

Memasuki tahun 2021, pertumbuhan investasi di seluruh wilayah mulai pulih kembali ke wilayah positif, meski dengan level yang masih relatif rendah (sekitar 1 hingga 3 persen), menandakan tahap awal pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Tren pemulihan ini berlanjut dan semakin menguat pada tahun 2022, di mana pertumbuhan investasi kembali ke level yang mendekati kondisi sebelum pandemi (sekitar 4 hingga 7 persen di beberapa wilayah), khususnya terlihat pada Kabupaten Sidoarjo yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2023, pertumbuhan investasi kembali menurun cukup signifikan di seluruh wilayah dibandingkan tahun 2022, meski Kota Surabaya dan Kabupaten

Sidoarjo masih mempertahankan pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Secara keseluruhan, pola pertumbuhan investasi di wilayah GKS menunjukkan tren berbentuk V (V-shaped), yaitu penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi, diikuti pemulihan bertahap pada 2021–2022, namun kembali melambat pada 2023. Pola ini konsisten dan sejalan dengan pergerakan variabel TPT Jawa Timur yang sudah kamu tampilkan sebelumnya, sehingga dapat memperkuat argumen di Bab IV bahwa guncangan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berdampak luas dan serentak terhadap seluruh indikator makroekonomi (konsumsi, investasi, dan pengangguran) di wilayah Gerbangkertosusila.

Grafik 1.5



Tingkat Pengangguran Terbuka Gerbangkertosusila Kawasan Gerbangkertosusila
(persen) Tahun 2017 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2023

Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan investasi di ketujuh wilayah (Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Bangkalan, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya) menunjukkan pola pergerakan yang relatif fluktuatif namun cenderung positif pada periode 2017–2019, dengan nilai pertumbuhan investasi berkisar antara 4 hingga 8 persen di hampir seluruh wilayah. Pada periode ini, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya cenderung menunjukkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sementara Kota Mojokerto relatif berada di level yang lebih rendah.

Perubahan paling drastis terjadi pada tahun 2020, di mana pertumbuhan investasi di seluruh tujuh wilayah anjlok tajam ke wilayah negatif, dengan penurunan paling ekstrem terjadi di Kota Mojokerto yang mencapai sekitar -7 persen, diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya yang juga berkontraksi pada kisaran -2 hingga -5 persen. Kondisi ini secara jelas mengonfirmasi dampak pandemi Covid-19 terhadap iklim investasi di seluruh wilayah Gerbangkertosusila, di mana ketidakpastian ekonomi global dan domestik, pembatasan aktivitas usaha, serta menurunnya kepercayaan investor menyebabkan realisasi investasi (PMTB) mengalami kontraksi serentak di seluruh kabupaten/kota pada tahun yang sama — memperkuat temuan bahwa tahun 2020 merupakan titik guncangan struktural (structural break) dalam data panel penelitian ini, konsisten dengan pola yang juga terlihat pada data TPT Jawa Timur sebelumnya.

Memasuki tahun 2021, pertumbuhan investasi di seluruh wilayah mulai pulih kembali ke wilayah positif, meski dengan level yang masih relatif rendah (sekitar 1 hingga 3 persen), menandakan tahap awal pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Tren pemulihan ini berlanjut dan semakin menguat pada tahun 2022, di mana pertumbuhan investasi kembali ke level yang mendekati kondisi sebelum pandemi (sekitar 4 hingga 7 persen di beberapa wilayah), khususnya terlihat pada Kabupaten Sidoarjo yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2023, pertumbuhan investasi kembali menurun cukup signifikan di seluruh wilayah dibandingkan tahun 2022, meski Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo masih mempertahankan pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Secara keseluruhan, pola pertumbuhan investasi di wilayah GKS menunjukkan tren berbentuk V (V-shaped), yaitu penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi, diikuti pemulihan bertahap pada 2021–2022, namun kembali melambat pada 2023. Pola ini konsisten dan sejalan dengan pergerakan variabel TPT Jawa Timur yang sudah kamu tampilkan sebelumnya, sehingga dapat memperkuat argumen di Bab IV bahwa guncangan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berdampak luas dan serentak terhadap seluruh indikator makroekonomi (konsumsi, investasi, dan pengangguran) di wilayah Gerbangkertosusila

Kabupaten/Kota yang merupakan kawasan metropolitan Jawa Timur terdiri dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Kawasan ini memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur

dengan kontribusi PDRB yang signifikan terhadap perekonomian provinsi. Dari tingkat pertumbuhan ekonomi keenam daerah tersebut tentunya berbeda dari berbagai faktor. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang beragam. Oleh karena itu kawasan yang menjadi perhatian khusus yaitu kawasan Gerbangkertosusila.

Gerbangkertosusila di bentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 1997, yang memiliki kawasan strategis untuk mengatur perkembangan beberapa wilayah dan membangun sebuah konektivitas antar daerah penyangga ekonomi ini. Gerbangkertosusila ini awalnya disebut sebagai Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang digunakan untuk mencapai sebuah keberhasilan pembangunan merata dan mengatasi masalah urbanisasi di sekitar kota metropolitan ini. (Ridho'i 2019)

Selain itu pemerintah menetapkan dalam Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2022, mengenai kawasan Gerbangkertosusila, kawasan ini ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pada infrastruktur. Gerbangkertosusila memiliki luas 6.373,2 km. (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah). Ada juga salah satu wilayah di Jawa Timur seperti Tapal Kuda yang di dalamnya berisikan 7 wilayah juga, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember , Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo. Kawasan ini merupakan area budaya dan geografis, khususnya Jember dan Banyuwangi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di bandingkan dengan yang lainnya. Fungsi dari kawasan Tapal Kuda ini yaitu sebagai pusat *hinterland* dan penyangga, dan

tentunya berbeda dengan kawasan metropolitan terpadu seperti yang akan saya teliti dalam penelitian saya ini yaitu kawasan Gerbangkertosusila. Untuk mengatasi pengangguran, maka mutlak diperlukan perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja secara produktif tidak hanya berarti menciptakan lapangan kerja baru, tetapi meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Apabila tenaga kerja meningkat, maka pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan regional dan meningkatkan laju pertumbuhan regional serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kawasan Gerbangkertosusila dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila yang cenderung meningkat disertai pula dengan kondisi Pengeluaran Pemerintah di Kawasan Gerbangkertosusila yang tidak stabil, dan presentase Pendapatan Perkapita yang cenderung meningkat maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kawasan Gerbangkertosusila"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila?
2. Apakah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila?

3. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Gerbangkertosusila.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Gerbangkertosusila.
3. Untuk menganalisis pengaruh Investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Gerbangkertosusila.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Investasi secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Gerbangkertosusila.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian dalam penyusunan Skripsi berjudul "**Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kawasan Gerbangkertosusila**" ditentukan dengan menggunakan variabel *independent* yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, serta Investasi, kemudian dengan menggunakan variabel *dependentnya* yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi pembangunan, khususnya dalam kajian determinan ketenagakerjaan di tingkat regional, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara sisi permintaan agregat (konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kawasan aglomerasi perkotaan di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah di kawasan Gerbangkertosusila, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal daerah dan kebijakan investasi yang lebih efektif dalam menekan angka pengangguran. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan model empiris determinan ketenagakerjaan daerah, khususnya di kawasan aglomerasi metropolitan.